

BAB I

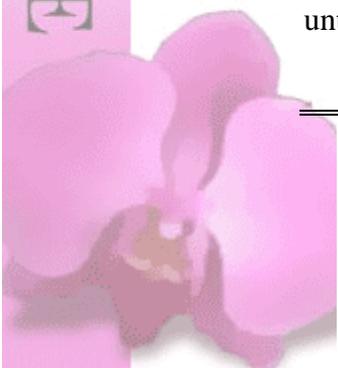
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini mulai meningkat. Semua ini akibat bertambah banyak pelaku usaha dan badan usaha yang berdiri untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia terdapat 3 pelaku perekonomian nasional, yaitu swasta, pemerintah, dan koperasi. Sebagai salah satu badan usaha dalam system perekonomian di Indonesia, koperasi diharapkan dapat berkembang secara sehat dan dinamis. Peran koperasi sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, karena tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukan kinerja yang secara umum positif. Pada periode 2012 – 2016, angka pertumbuhan koperasi aktif rata – rata 2,5 persen, dan anggota sebesar 2,4 persen. Berdasarkan data, hingga 5 juli 2017, jumlah anggota koperasi mencapai 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi. Mengingat hal ini baru sekitar 80.008 koperasi aktif yang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2017 (*sumber: sumber kementria koperasai dan UMKM 2017*).

Dalam usaha membantu pengembangan perekonomian rakyat, kegiatan produksi dan konsumsi untuk pribadi masyarakat serta bagi masyarakat lainnya secara menyeluruh, semua kegiatannya berawal dari masyarakat itu sendiri. Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikannya laba sebagai tujuan utama karena koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karaktersistik



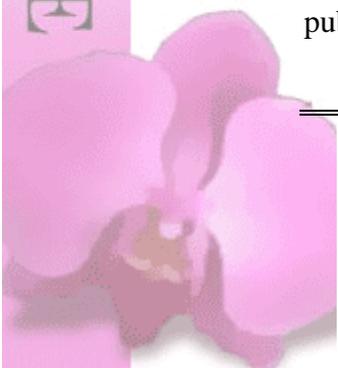
koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Perkoperasian semakin berkembang dengan mendapat perhatian khusus melalui penerapan sistem pembukuan akuntansi. Karena akuntansi merupakan alat manajemen yang dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan informasinya dan berguna dalam pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pengendalian agar dapat tercapainya tujuan suatu koperasi.

Standar pelaporan keuangan untuk koperasi dan UMKM sendiri sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sebelum dialihkan dari PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian sebagai bentuk konvergensi ke International Financial Reporting Standar (IFRS) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM No.12/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor rill, bahwa koperasi sektor rill yang tidak memiliki akuntabilitas publik maka diwajibkan laporan keuangannya mengacu kepada SAK ETAP.

SAK ETAP berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang di mulai pada atau setelah 1 Januari 2011. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik



signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan ditetapkannya standar tersebut koperasi diharapkan mampu menerapkan dan menyesuaikan apa yang telah diatur di dalamnya, sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk mendorong koperasi yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan dan penyajian laporan keuangan koperasi sudah menerapkan SAK ETAP?

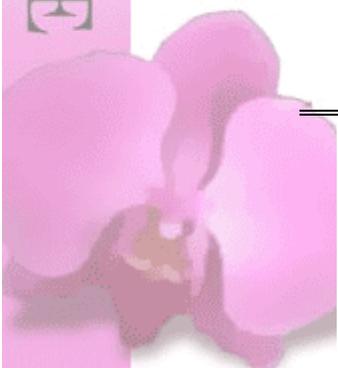
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini sebagai pengimplementasian dari ilmu yang didapat di perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sedangkan bagi pembaca penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi badan usaha yaitu koperasi maupun usaha kecil lainnya penelitian ini memberi manfaat kepada manajer ataupun pemilik usaha berupa pengetahuan tentang bagaimana menerapkan standar yang telah ditetapkan (SAK ETAP) dalam menyusun laporan keuangan sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta transparansi, akuntabilitas, dan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk mendorong koperasi yang lebih baik.